



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2018-2019 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke- | : 5 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Senin, 18 Maret 2019 |
| Waktu | : Pukul 09.30 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : 1. Audiensi terkait permasalahan kasus pertanahan; 2. Audiensi terkait guru Inpassing; 3. Audiensi terkait Pembentukan Kecamatan Kute Siantan; 4. Audiensi terkait Pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara. |
| Ketua Rapat | : Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI. |
| Sekretaris Rapat | : Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 18 Anggota Komisi II DPR RI B. Muh Fadhly Prayodi, SH, MH (Prayodi Associate) C. Ketua Umum FORKADA PP DOB Kabupaten Bangka Utara. D. Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasioanal. E. Ketua Paguyuban Warga Kemayoran F. Ketua Panitia Pembentukan Kecamatan Kute Siantan G. Ketua Forum Pembebasan lahan sengketa 8 kampung dengan TNI Al Tanjung Uban. |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Muh Fadhly Prayodi, SH, MH (Prayodi Associate), Ketua Umum FORKADA PP DOB Kabupaten Bangka Utara, Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasioanal, Ketua Paguyuban Warga Kemayoran, Ketua Panitia Pembentukan Kecamatan Kute Siantan, Ketua Forum Pembebasan lahan sengketa 8 kampung dengan TNI Al Tanjung Uban, agenda Audiensi terkait permasalahan kasus pertanahan, Guru Inpassing, Pembentukan Kecamatan Kute Siantan dan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Bangka Utara, pada hari Senin, 18 Maret 2019, dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Prayodi and Associate menyampaikan aspirasi terkait permasalahan sengketa alas hak antara pihak klien Prayodi dengan pemerintah (cipta karya). Klien Prayodi dikalahkan dalam pengadilan tingkat kasasi. Padahal ada beberapa temuan terkait kepemilikan asset/alas hak tersebut. Prayodi meminta adanya musyawarah dengan pihak terkait. Komisi II DPR RI akan mengundang para termohon untuk menyelesaikan masalah ini.
2. Forkada PP DOB Kab Kepulauan Bangka Utara menyampaikan usulan DOB kepada Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI akan mengundang kembali para pihak yang mengusulkan DOB setelah pemilu 2019.
3. Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) menyampaikan aspirasi terkait keinginan untuk diangkat menjadi CPNS dan melakukan revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN agar guru inpassing nasional dapat masuk dalam kategori ASN atau dibuatkan PP khusus tentang guru inpassing. Komisi II DPR RI akan menyampaikan aspirasi PGIN pada raker dengan Menteri PANRB tanggal 18 Maret 2019 pukul 15.00.
4. Paguyuban warga kemayoran menyampaikan aspirasi terkait masa berlaku HPL yang sudah tidak berlaku lagi Namun pihak PPK Kemayoran menganggap HPL masih berlaku. Padahal warga kemayoran memiliki sertifikat hak milik atas tanah mereka. Komisi II DPR RI akan mengundang Sekretariat Negara, PPK Kemayoran dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemilu 2019 selesai.
5. Panitia pembentukan Kecamatan Kute Siantan menyampaikan usulan pemekaran Kecamatan kepada Komisi II DPR RI. Selanjutnya Komisi II DPR RI sepakat untuk meneruskan surat kepada Pimpinan DPR RI agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.

6. Forum 8 kampung menyampaikan aspirasi terkait permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi sejak tahun 1954 dengan pihak TNI AL. Forum 8 kampung sedang menunggu putusan pengadilan terkait kasus ini dan mengharapkan ada itikad baik dari pihak TNI AL untuk mau melakukan musyawarah agar permasalahan ini cepat selesai. Komisi II DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas permasalahan ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 18 Maret 2019
KETUA RAPAT

TTD

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419